

Prosperity for All

Jalan Menuju Kemakmuran Inklusif di Era Globalisasi



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

12 April 2026

PROSPERITY FOR ALL: JALAN MENUJU KEMAKMURAN INKLUSIF DI ERA GLOBALISASI

Abstrak

Makalah ini membahas bagaimana gagasan *prosperity for all* atau kemakmuran untuk semua dapat diterjemahkan menjadi agenda kebijakan yang realistis di tengah era globalisasi yang makin kompleks, terdigitalisasi, dan rentan terhadap guncangan geopolitik, iklim, serta ketimpangan. Argumen utama makalah ini adalah bahwa globalisasi pada dirinya bukanlah jaminan bagi kemakmuran inklusif. Perdagangan, investasi, teknologi, dan integrasi pasar memang telah membantu mengangkat miliaran orang dari kemiskinan dan mempersempit sebagian kesenjangan antarnegeri, tetapi manfaatnya terbukti terdistribusi secara tidak merata antarkelompok sosial, antarwilayah, dan antargenerasi. Laporan-laporan mutakhir dari World Bank, WTO, ILO, ITU, UNDP, dan IMF menunjukkan bahwa kemajuan pengurangan kemiskinan global melambat, kesenjangan antarnegara kembali melebar, pasar kerja tetap rapuh, transformasi digital belum merata, dan risiko iklim semakin menggerus capaian kesejahteraan. ([World Bank](#))

Berdasarkan kondisi tersebut, makalah ini menawarkan kerangka jalan menuju kemakmuran inklusif yang bertumpu pada lima poros: pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan bermutu, pemerataan

kesempatan sebelum pasar bekerja, tata kelola pasar yang adil dan terbuka, negara kesejahteraan yang adaptif melalui fiskal progresif dan perlindungan sosial, serta transformasi digital-hijau yang memperluas kapabilitas manusia. Makalah ini juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola global agar negara berkembang tidak sekadar menjadi pasar, melainkan menjadi pelaku aktif pencipta nilai. Pada akhirnya, kemakmuran inklusif menuntut perubahan paradigma: dari mengejar pertumbuhan semata menuju membangun masyarakat yang produktif, berdaya tahan, bermartabat, dan terbuka bagi mobilitas sosial. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kata kunci: kemakmuran inklusif, globalisasi, ketimpangan, pembangunan manusia, pekerjaan bermutu, transformasi digital, perlindungan sosial, kebijakan publik

Prosperity for All: Jalan Menuju Kemakmuran Inklusif di Era Globalisasi

1. Pendahuluan

Dalam perdebatan pembangunan kontemporer, pertanyaan yang semakin mengemuka bukan lagi apakah ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan itu, seberapa tahan capaian tersebut terhadap guncangan, dan apakah kemajuan ekonomi sungguh memperluas kebebasan manusia untuk hidup layak. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam era globalisasi. Selama tiga dekade terakhir, dunia memang menyaksikan integrasi perdagangan, investasi, teknologi, dan arus informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. WTO mencatat bahwa selama kira-kira 30 tahun terakhir dunia mengalami periode konvergensi pendapatan yang sangat besar, di mana kesenjangan tingkat pendapatan antarnegeri menyempit dan kondisi hidup banyak orang membaik. Namun

WTO juga menegaskan bahwa tidak semua individu, wilayah, dan negara memperoleh manfaat yang setara dari keterbukaan itu. ([World Trade Organization](#))

Masalahnya menjadi lebih mendesak ketika data mutakhir menunjukkan bahwa mesin kemajuan global mulai tersendat. World Bank melaporkan bahwa perbaikan dalam *shared prosperity* atau kemakmuran bersama tertahan sejak pandemi, dan bahwa pertumbuhan yang lebih cepat saja tidak cukup jika tidak inklusif. Menurut World Bank, sekitar seperlima penduduk dunia hidup di negara-negara dengan ketimpangan tinggi, sementara pada laju pertumbuhan saat ini sebuah negara berpendapatan menengah atas yang tipikal dapat memerlukan sekitar 100 tahun untuk menutup *prosperity gap*. ([World Bank](#)) UNDP bahkan memperingatkan bahwa kenaikan pembangunan manusia global yang diproyeksikan untuk 2024 adalah yang paling lemah sejak 1990, di luar tahun-tahun krisis, dan bahwa ketimpangan antara negara ber-HDI rendah dan sangat tinggi meningkat untuk tahun keempat berturut-turut. ([UNDP](#))

Di pasar kerja, gambaran yang muncul juga ambivalen. ILO mencatat pengangguran global pada 2024 bertahan di 5 persen, tetapi *jobs gap*—yakni jumlah orang yang ingin bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan—masih berada di sekitar 402,4 juta. ILO juga menekankan bahwa kemajuan menuju pekerjaan layak berjalan lambat, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. ([International Labour Organization](#))

Dalam ranah digital, ITU menunjukkan bahwa universalitas akses internet masih jauh dari tercapai, terutama di kawasan berpendapatan rendah; pada 2024 terdapat 189 juta lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang menggunakan internet, dan kesenjangan kota-desa pun masih sulit dijembatani. ([ITU](#))

Karena itu, tema *Prosperity for All* bukan slogan moral belaka, melainkan agenda struktural. Ia menuntut pemahaman baru bahwa kemakmuran yang sah harus bertumpu pada distribusi peluang, kapasitas produktif,

akses terhadap infrastruktur sosial dan digital, perlindungan terhadap risiko, dan partisipasi adil dalam pasar nasional maupun global. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kemakmuran inklusif berarti seseorang tidak tertinggal hanya karena lahir di wilayah tertentu, jenis kelamin tertentu, kelas sosial tertentu, atau karena ekonominya terdisrupsi oleh teknologi, perdagangan, konflik, atau perubahan iklim. Kerangka seperti ini sejalan dengan penekanan World Bank bahwa pertumbuhan rata-rata semata bukan penanda memadai bagi pembangunan, serta dengan seruan UNDP agar teknologi, termasuk AI, diposisikan sebagai perluasan pilihan manusia, bukan sekadar peningkatan efisiensi ekonomi. ([World Bank](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa jalan menuju kemakmuran inklusif di era globalisasi harus dibangun melalui sintesis antara pertumbuhan, keadilan, produktivitas, dan resiliensi. Globalisasi perlu diarahkan ulang dari model yang terlalu menyanjung efisiensi pasar menuju model yang juga menekankan kesempatan yang setara, nilai tambah lokal, pekerjaan bermutu, dan kemampuan masyarakat menghadapi guncangan. Dengan demikian, tujuan makalah ini adalah menjelaskan tantangan pokok menuju kemakmuran inklusif dan merumuskan kerangka kebijakan yang dapat menghubungkan keterbukaan ekonomi global dengan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

2. Memaknai Kemakmuran Inklusif: Dari PDB ke Kapabilitas

Kemakmuran inklusif perlu dibedakan dari sekadar pertumbuhan output. Selama beberapa dekade, keberhasilan ekonomi sering diringkas dalam satu ukuran dominan: pertumbuhan PDB. Ukuran ini penting, tetapi ia tidak otomatis memberi jawaban atas kualitas distribusi pendapatan, mutu pekerjaan, akses pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, keamanan ekonomi, maupun daya tahan rumah tangga terhadap guncangan. World Bank dalam pembahasan *shared prosperity* menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan rata-rata saja bukan penanda pembangunan

yang cukup, sebab yang menentukan adalah bagaimana pertumbuhan itu terdistribusi, terutama bagi kelompok terbawah. ([World Bank](#))

Dalam perspektif pembangunan manusia, kemakmuran inklusif lebih dekat dengan perluasan kapabilitas. UNDP mengingatkan bahwa tujuan pembangunan manusia adalah agar orang dapat menjalani hidup yang mereka nilai berharga, dan bahwa di era AI sekalipun pertanyaan pokoknya tetap tentang pilihan manusia yang dapat diwujudkan. Dengan kata lain, masyarakat disebut makmur bukan hanya ketika barang dan jasa bertambah, tetapi ketika lebih banyak orang mampu belajar, bekerja, berinovasi, berpartisipasi, dan hidup lebih aman dari risiko kemiskinan, penyakit, pengangguran, dan eksklusi digital. ([Human Development Reports](#))

Kemakmuran inklusif juga harus dibaca sebagai relasi antara efisiensi dan keadilan, bukan sebagai pertentangan biner di antara keduanya. Kebijakan yang memperluas akses pendidikan anak usia dini, kesehatan dasar, konektivitas digital, kredit produktif, dan perlindungan sosial sering dipandang sebagai kebijakan distribusi. Padahal, World Bank menekankan bahwa intervensi pra-pasar seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan keluarga memperkuat produktivitas dan mengurangi ketimpangan kesempatan; intervensi di pasar seperti hak tenaga kerja, akses aset produktif, dan kredit bagi usaha kecil mendukung penciptaan pendapatan; sedangkan intervensi pasca-pasar melalui pajak, transfer, dan subsidi yang tepat sasaran membantu mengoreksi ketimpangan hasil. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Dari sudut pandang ini, kemakmuran inklusif dapat dirumuskan sebagai keadaan ketika sistem ekonomi menghasilkan nilai tambah yang terus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu sekaligus memperluas peluang partisipasi, memperbaiki distribusi hasil, dan memperkuat ketahanan sosial. Rumusan ini penting karena era globalisasi menghadirkan paradoks: integrasi ekonomi dapat menaikkan total kue ekonomi, tetapi juga dapat

memperbesar jurang bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan, konektivitas, modal, atau perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, kemakmuran inklusif menuntut arsitektur kebijakan yang menghubungkan tiga lapis sekaligus: peluang sebelum pasar, fairness di dalam pasar, dan koreksi setelah pasar.

3. Globalisasi: Mesin Peluang yang Tidak Otomatis Adil

Tidak tepat menggambarkan globalisasi semata-mata sebagai sumber masalah. WTO menegaskan bahwa keterbukaan perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung banyak pekerjaan, dan memberi akses pada barang serta jasa yang lebih terjangkau. Selama beberapa dekade, proses itu berkontribusi pada konvergensi pendapatan antarnegeri yang besar. Kebijakan proteksionis, menurut WTO, juga tidak otomatis melindungi ekonomi secara keseluruhan dan tidak menjamin inklusivitas di dalam negeri. Namun WTO sekaligus menekankan bahwa agar manfaat perdagangan lebih inklusif, kebijakan dagang harus dilengkapi dengan kebijakan domestik yang tepat di bidang tenaga kerja, pendidikan, dan persaingan. ([World Trade Organization](#))

Di sinilah globalisasi harus dibaca secara lebih cermat. Globalisasi membuka peluang skala besar bagi negara yang mampu membangun kapabilitas domestik: infrastruktur, pendidikan, tata kelola, lembaga pasar, dan ekosistem inovasi. Tetapi bagi negara, wilayah, atau kelompok yang memasuki kompetisi global tanpa fondasi tersebut, globalisasi bisa memerangkap mereka pada posisi berupah rendah, bergantung pada komoditas mentah, atau menjadi pasar bagi produk dan platform asing tanpa menguasai rantai nilai. World Development Report 2024 menyebut bahwa banyak negara berpendapatan menengah menghadapi *middle-income trap*, dan bahwa strategi pembangunan lama yang hanya mengandalkan investasi tidak lagi cukup. Negara perlu bergerak dari investasi menuju *infusion* teknologi dan praktik bisnis, lalu ke inovasi. Hanya 34 ekonomi berpendapatan menengah sejak 1990-an yang berhasil

naik menjadi berpendapatan tinggi; selebihnya masih tertahan. ([World Bank](#))

Di tingkat global, IMF memperingatkan bahwa pertumbuhan dunia memasuki titik rawan, dengan ketidakpastian baru, ketegangan dagang yang meningkat, risiko pengetatan kondisi keuangan, dan keterbatasan bantuan pembangunan internasional yang dapat mendorong negara berpendapatan rendah lebih dalam ke jebakan utang. IMF juga menekankan bahwa gejolak biaya hidup dapat menghidupkan kembali keresahan sosial. ([IMF](#)) Artinya, globalisasi hari ini bukan lagi globalisasi “mulus” seperti dalam imajinasi dekade 1990-an. Ia kini berjalan di bawah bayang-bayang fragmentasi geopolitik, dekarbonisasi, keamanan pasokan, perubahan demografi, dan revolusi AI.

Narasi sederhana “buka pasar maka semua akan sejahtera” karena itu tidak lagi memadai. Yang lebih tepat adalah: keterbukaan dapat menjadi mesin kemakmuran jika dilandasi kebijakan domestik yang memperkuat kapasitas produktif masyarakat, menegakkan fairness, dan membangun jaring pengaman yang adaptif. Globalisasi yang tidak dikawal kebijakan seperti itu akan cenderung memperbesar dualisme: sektor unggul yang sangat terhubung dengan pasar global hidup berdampingan dengan wilayah, pekerja, dan usaha kecil yang tertinggal.

4. Mengapa Kemakmuran Inklusif Sulit Dicapai?

4.1 Ketimpangan yang persisten

Ketimpangan tetap menjadi penghalang paling besar bagi agenda kemakmuran inklusif. World Bank menyatakan bahwa ketimpangan tinggi sering mencerminkan kurangnya peluang mobilitas sosial-ekonomi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan. ([World Bank](#)) Data World Inequality Database menunjukkan bahwa pada 2023 rata-rata pendapatan nasional per kapita global memang mencapai sekitar €12.800 PPP per tahun, tetapi angka itu

menutupi disparitas regional yang sangat besar: rata-rata di Sub-Sahara Afrika sekitar €240 per bulan, dibanding lebih dari €3.500 di Amerika Utara dan Oseania. WID juga menegaskan bahwa ketimpangan di dalam negara tetap sangat besar di seluruh dunia. ([WID - World Inequality Database](#))

Ketimpangan ini bukan semata soal moral; ia adalah soal efisiensi pembangunan. Ketika kualitas pendidikan, kesehatan, konektivitas, kredit, dan pekerjaan bermutu terkonsentrasi pada kelompok tertentu, talenta banyak orang menjadi tidak termanfaatkan. World Bank menekankan bahwa ketimpangan kesempatan di tahap pra-pasar menghasilkan perbedaan modal manusia, lalu diperparah oleh distorsi pasar tenaga kerja, akses aset yang timpang, dan akhirnya bisa diperkuat oleh sistem pajak yang regresif. ([Serviços e Informações do Brasil](#)) Dengan demikian, ketimpangan menciptakan lingkaran setan: ketidaksetaraan kesempatan melahirkan ketidaksetaraan hasil, dan ketidaksetaraan hasil mempersempit kesempatan generasi berikutnya.

4.2 Pasar kerja yang tumbuh tetapi tidak selalu memberi pekerjaan layak

Di banyak negara, pekerjaan tersedia tetapi pekerjaan layak tidak bertumbuh secepat yang dibutuhkan. ILO mencatat bahwa *jobs gap* global masih sekitar 402,4 juta pada 2024, sementara kemajuan mengurangi kesenjangan gender di pasar kerja berjalan lambat. Pada data figur ILO, *global jobs gap* turun dari 16 persen pada 2004 menjadi 9 persen pada 2024, tetapi perempuan tetap menghadapi kesenjangan yang lebih tinggi daripada laki-laki. ([International Labour Organization](#)) Ini menunjukkan bahwa perbaikan agregat tidak otomatis menghapus eksklusi struktural.

Era globalisasi digital juga melahirkan fenomena *polarization*: pekerjaan sangat terampil dan sangat rendah upah bertambah, sedangkan pekerjaan menengah banyak yang tergerus otomatisasi, relokasi, dan model bisnis baru. UNDP mencatat bahwa separuh responden global merasa pekerjaan mereka dapat diotomatisasi, walau mayoritas tetap berharap AI membuka

peluang baru. Harapan ini masuk akal, tetapi tanpa pendidikan ulang, pelatihan vokasional, perlindungan pekerja platform, dan mobilitas tenaga kerja, transformasi teknologi bisa melahirkan kemakmuran yang eksklusif. ([UNDP](#))

4.3 Kesenjangan digital

Dalam ekonomi yang makin terdigitalisasi, eksklusi digital sama berbahayanya dengan eksklusi pendidikan pada abad sebelumnya. ITU menegaskan bahwa penggunaan internet terus tumbuh, tetapi universalitas masih sulit dicapai, terutama di wilayah berpendapatan rendah. Pada 2024, 70 persen laki-laki dan 65 persen perempuan menggunakan internet, menyisakan selisih 189 juta pengguna. ITU juga menyoroti minimnya kemajuan dalam menjembatani kesenjangan urban-rural. ([ITU](#)) UNDP bahkan menekankan bahwa di era AI, menutup kesenjangan listrik dan internet menjadi semakin mendesak agar tidak ada yang tersisih dari peluang baru. ([UNDP](#))

Kesenjangan digital bukan hanya soal perangkat atau sinyal. Ia juga menyangkut keterampilan, keamanan digital, kemampuan menggunakan data, dan akses terhadap transaksi keuangan digital. World Bank melalui Global Findex 2025 menunjukkan bahwa 79 persen orang dewasa di dunia kini memiliki akun keuangan, dan edisi 2025 untuk pertama kalinya juga mengukur kepemilikan ponsel, penggunaan internet, dan keselamatan digital. Namun World Bank menegaskan bahwa masih ada kesenjangan akses dan penggunaan antara perempuan dan kelompok miskin. ([World Bank](#)) Jadi, tanpa agenda inklusi digital yang serius, digitalisasi justru dapat memperkeras garis pemisah sosial.

4.4 Perlindungan sosial yang belum memadai

Globalisasi dan teknologi memperbesar kebutuhan akan negara yang mampu menyerap guncangan. World Bank dalam *State of Social Protection Report 2025* melaporkan bahwa di negara berpendapatan rendah dan

menengah, 2 miliar orang masih tidak tercakup atau tercakup secara tidak memadai oleh perlindungan sosial; tiga dari empat orang di negara berpendapatan rendah belum mendapat cakupan semacam itu. Meskipun perlindungan sosial telah meluas ke 4,7 miliar orang di negara-negara tersebut antara 2010 dan 2022, gap perlindungan tetap sangat besar.

([World Bank](#))

Masalah ini krusial karena rumah tangga miskin tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga rentan terhadap kejutan: sakit, kehilangan kerja, bencana iklim, kenaikan harga pangan, atau krisis energi. Tanpa bantalan sosial, satu guncangan saja dapat menjatuhkan keluarga kembali ke kemiskinan. World Bank juga menunjukkan bahwa di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah, belanja untuk subsidi energi dan pertanian sering kali lebih besar daripada transfer sosial, padahal hanya sekitar 20 persen belanja subsidi yang mencapai 40 persen penduduk terbawah. ([Serviços e Informações do Brasil](#)) Ini memberi pelajaran penting: desain kebijakan sama pentingnya dengan besarnya anggaran.

4.5 Risiko iklim dan pemburukan pembangunan manusia

Iklim kini bukan lagi isu tambahan, melainkan faktor inti yang menentukan keberlanjutan kemakmuran. World Bank melaporkan bahwa satu dari lima orang berisiko menghadapi peristiwa cuaca ekstrem dalam hidupnya, yang dapat menggagalkan upaya pengurangan kemiskinan. ([World Bank](#)) Di sisi lain, World Bank juga menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan *shared prosperity* pada planet yang layak huni menuntut dua hal sekaligus: pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif, serta perlindungan masyarakat dari guncangan iklim. ([World Bank](#))

UNDP menambahkan bahwa dunia menghadapi perlambatan pembangunan manusia dan kesenjangan yang makin lebar antarnegara kaya dan miskin. Tekanan ini diperparah oleh ketegangan perdagangan, krisis utang, dan apa yang disebut sebagai *jobless industrialization* di sejumlah negara. ([UNDP](#)) Dengan kata lain, bila ekonomi masa depan

dibangun tanpa fondasi hijau dan tangguh, kemakmuran yang dihasilkan akan mudah tererosi.

5. Jalan Menuju Kemakmuran Inklusif

Jika hambatannya bersifat struktural, maka jalan keluarnya juga harus struktural. Kemakmuran inklusif tidak bisa lahir dari satu kebijakan tunggal. Ia membutuhkan paket kebijakan yang menyentuh tahap pra-pasar, di pasar, dan pasca-pasar secara serentak.

5.1 Menciptakan pertumbuhan yang kaya pekerjaan bermutu

Pilar pertama adalah pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan bermutu, bukan sekadar ekspansi output. World Bank menekankan bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran membutuhkan pertumbuhan yang memperbesar pendapatan tenaga kerja dengan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik serta meningkatkan kapasitas produktif kelompok miskin. ([World Bank](#)) Dalam konteks ini, strategi industrialisasi, hilirisasi, penguatan manufaktur modern, ekonomi kreatif, dan layanan berbasis teknologi harus diukur bukan hanya dari nilai investasi, tetapi dari dampaknya pada penyerapan kerja, keterkaitan ke UMKM, peningkatan keterampilan, dan penyebaran manfaat ke daerah.

World Development Report 2024 memberi kerangka penting melalui strategi 3i: *investment*, *infusion*, dan *innovation*. Negara tidak cukup hanya menarik modal; mereka harus mengadopsi teknologi dan praktik bisnis dari luar, lalu bergerak ke inovasi. Ini berarti kebijakan industri modern perlu lebih cerdas: mendorong keterhubungan dengan rantai nilai global, tetapi juga membangun kemampuan domestik agar tidak sekadar menjadi lokasi produksi berupah murah. ([World Bank](#))

5.2 Memperluas kesempatan sejak sebelum pasar bekerja

Pilar kedua adalah pemerataan kesempatan sejak awal kehidupan. World Bank sangat jelas menyatakan bahwa intervensi pra-pasar harus berfokus

pada pendidikan, kesehatan, dan dukungan keluarga. Akses pada pendidikan anak usia dini, pendanaan pendidikan dasar-menengah yang lebih setara, pendidikan tinggi yang terjangkau, cakupan kesehatan universal, serta dukungan keluarga seperti *childcare* yang terjangkau dapat mengurangi ketimpangan kesempatan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Secara akademik, ini berarti agenda kemakmuran inklusif harus dimulai jauh sebelum seseorang masuk pasar kerja. Anak yang lahir di keluarga miskin, perempuan yang menanggung beban pengasuhan, remaja di desa tanpa internet, atau pekerja muda yang tidak punya akses pelatihan akan memulai kompetisi dengan garis start yang tidak sama. Bila negara membiarkan ketimpangan awal ini, pasar kemudian hanya akan “memvalidasi” ketimpangan yang sebenarnya diproduksi sejak awal. Karena itu, pendidikan berkualitas, gizi, kesehatan dasar, konektivitas, dan transportasi publik bukanlah pengeluaran konsumtif, melainkan investasi produktivitas jangka panjang.

5.3 Menata pasar agar lebih adil, terbuka, dan kompetitif

Pilar ketiga adalah fairness di dalam pasar. World Bank menyatakan bahwa kebijakan di-pasar perlu memperluas akses kerja dan pendapatan, memperbaiki akses terhadap aset produktif seperti lahan, memperkuat hak tenaga kerja dan kondisi kerja yang aman, serta menyediakan kredit dan layanan pengembangan usaha bagi usaha kecil, terutama di komunitas yang kurang terlayani. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Keadilan pasar juga berkaitan dengan persaingan. World Development Report 2024 menekankan pentingnya mendisiplinkan *vested interests* dan membangun pasar yang kontestabel. Keterbukaan pada perdagangan, investasi, dan talenta asing membantu peningkatan teknologi, tetapi harus disertai rezim persaingan yang memungkinkan pendatang baru tumbuh dan mencegah dominasi berlebihan oleh pelaku incumbent. ([World Bank](#)) Tanpa kompetisi yang sehat, manfaat globalisasi akan tertangkap oleh

segelintir aktor besar, sementara usaha kecil, inovator baru, dan tenaga kerja lokal hanya menerima sisa nilai.

Narasi sederhanaanya bisa dibayangkan demikian. Sebuah kota kecil berhasil tersambung ke pasar global melalui platform digital. Produk lokal mulai laku, investor datang, dan permintaan meningkat. Tetapi bila pembiayaan murah hanya tersedia bagi perusahaan besar, data pasar dikuasai platform tunggal, logistik dikendalikan segelintir pelaku, dan tenaga kerja lokal tidak dilatih naik kelas, maka kota itu memang "terglobalisasi", tetapi belum tentu makin makmur secara inklusif. Nilai tambahnya bocor ke luar, sementara warga lokal hanya menjadi penonton atau buruh berupah rendah.

5.4 Membangun negara kesejahteraan yang adaptif

Pilar keempat adalah fiskal progresif dan perlindungan sosial yang adaptif. World Bank menyebut bahwa intervensi pasca-pasar mencakup pajak, transfer, dan subsidi, dan bahwa sistem pajak yang lebih progresif serta transfer yang pro-poor dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan. Investasi dalam perlindungan sosial seperti tunjangan pengangguran, pensiun, dan layanan kesehatan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan sekaligus melindungi kelompok rentan dari guncangan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Pelajaran penting dari dekade terakhir adalah bahwa negara perlu bergerak dari model perlindungan sosial residual menuju sistem yang lebih universal, portabel, dan responsif terhadap guncangan. World Bank mencatat bahwa selama pandemi, sistem perlindungan sosial yang sudah memiliki infrastruktur penyaluran yang kuat mampu merespons lebih efektif. ([World Bank](#)) Dalam konteks ekonomi digital, adaptasi ini berarti pekerja informal, pekerja *gig*, dan pelaku usaha mikro juga perlu masuk dalam cakupan dasar perlindungan. Tanpa itu, fleksibilitas ekonomi digital akan dibayar mahal dengan ketidakamanan sosial.

5.5 Menjamin inklusi digital dan keuangan

Pilar kelima adalah membangun fondasi digital yang inklusif. ITU menegaskan bahwa akses internet belum universal, dan kesenjangan gender serta kota-desa masih besar. ([ITU](#)) Sementara World Bank melalui Global Findex 2025 menunjukkan bahwa akses akun keuangan telah meningkat menjadi 79 persen orang dewasa secara global, tetapi perempuan dan kelompok miskin masih menghadapi gap dalam akses dan penggunaan layanan digital serta finansial. ([World Bank](#))

Artinya, kebijakan digital yang inklusif tidak cukup berhenti pada pembangunan menara BTS atau serat optik. Ia harus mencakup literasi digital, keamanan siber dasar, identitas digital, sistem pembayaran yang murah, interoperabilitas, perlindungan konsumen, serta pelatihan untuk UMKM dan pekerja. Di era AI, agenda ini semakin penting. UNDP menekankan bahwa akses terhadap listrik dan internet harus ditutup celahnya agar semua orang dapat memanfaatkan kemungkinan baru yang ditawarkan AI. ([UNDP](#))

5.6 Menghubungkan transisi hijau dengan keadilan sosial

Pilar keenam adalah memastikan bahwa transisi hijau bukan proyek elite, melainkan proyek kemakmuran bersama. WTO menyoroti bahwa diversifikasi rantai nilai global, digitalisasi yang menurunkan biaya dagang, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat membuka peluang baru bagi negara berpendapatan rendah dan menengah. ([World Trade Organization](#)) WDR 2024 juga menyatakan bahwa negara berpendapatan menengah dapat memanfaatkan krisis iklim dan energi untuk masuk ke rantai nilai rendah karbon, sembari memenuhi kebutuhan pertumbuhan, dekarbonisasi, dan keamanan energi. ([World Bank](#))

Tetapi transisi hijau yang inklusif membutuhkan kompensasi sosial, pelatihan ulang pekerja, investasi energi bersih yang terjangkau, dan distribusi manfaat yang tidak terkonsentrasi. Di sinilah prinsip *just*

transition menjadi penting. Ketika kebijakan iklim menaikkan biaya energi tanpa bantalan bagi rumah tangga miskin dan UMKM, kebijakan tersebut mudah kehilangan legitimasi sosial. Sebaliknya, ketika energi bersih dipadukan dengan penciptaan kerja lokal, transportasi publik, efisiensi bangunan, dan perlindungan sosial, transisi hijau dapat menjadi mesin baru kemakmuran inklusif.

6. Globalisasi yang Direkayasa Ulang: Dari Efisiensi ke Ketahanan dan Martabat

Kemakmuran inklusif mensyaratkan redefinisi tujuan globalisasi itu sendiri. Dalam bentuk lamanya, globalisasi sering beroperasi di bawah mantra efisiensi: produksi dipindah ke lokasi termurah, rantai pasok direntangkan sejauh mungkin, tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya, dan kebijakan domestik dinilai baik jika mampu menurunkan hambatan pasar. Model ini memang menaikkan efisiensi statis, tetapi ia juga memperbesar kerentanan terhadap krisis, memperdalam ketimpangan lokal, dan membuat banyak komunitas merasa ditinggalkan.

Laporan IMF April 2025 menyebut bahwa ketegangan dagang yang meningkat, ketidakpastian kebijakan, dan risiko arus modal keluar dapat semakin menghambat pertumbuhan, sementara bantuan pembangunan yang lebih terbatas bisa menekan negara berpendapatan rendah lebih dalam ke utang. ([IMF](#)) WDR 2024 juga menekankan bahwa kini ruang gerak negara makin menyempit oleh proteksionisme, utang, demografi, dan tekanan iklim. ([World Bank](#)) Dalam lingkungan seperti ini, globalisasi yang hanya mengandalkan efisiensi biaya menjadi semakin rapuh.

Yang diperlukan adalah globalisasi generasi baru: lebih tahan guncangan, lebih menghargai kapabilitas domestik, lebih adil dalam distribusi manfaat, dan lebih sensitif terhadap martabat kerja manusia. Dalam kerangka ini, ukuran keberhasilan bukan lagi hanya volume ekspor atau besarnya investasi, melainkan juga seberapa besar nilai tambah tertahan di dalam negeri, berapa banyak pekerjaan bermutu yang tercipta, apakah

perempuan dan kaum muda ikut naik kelas, apakah UMKM mendapat akses pasar, dan apakah kemajuan ekonomi tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan.

Secara naratif, pergeseran ini dapat dianalogikan dengan membangun jembatan. Globalisasi lama cenderung membangun jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan besar, tetapi membiarkan banyak desa, kota kecil, dan kelompok rentan berada jauh dari jalan masuknya. Globalisasi inklusif harus menambah “jalan penghubung”: pendidikan, internet, pembiayaan, logistik, persaingan sehat, dan perlindungan sosial. Tanpa itu, jembatan besar tetap megah, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melintasinya.

7. Implikasi bagi Negara Berkembang, Termasuk Indonesia

Bagi negara berkembang, agenda *prosperity for all* memerlukan keseimbangan antara keterbukaan dan pembangunan kapabilitas domestik. WTO menunjukkan bahwa banyak negara berpendapatan rendah dan menengah masih kesulitan melakukan diversifikasi dan integrasi yang lebih penuh ke perdagangan dunia. ([World Trade Organization](#)) WDR 2024 menegaskan bahwa negara berpendapatan menengah harus melampaui strategi yang hanya berbasis investasi menuju kombinasi investasi, adopsi teknologi, dan inovasi. ([World Bank](#)) Ini sangat relevan bagi negara seperti Indonesia: integrasi global akan bermanfaat besar bila diikuti penguatan manufaktur bernilai tambah, pendidikan vokasional, riset terapan, pelabuhan dan logistik, reformasi persaingan, serta digitalisasi UMKM.

Implikasi kedua adalah perlunya memandang kebijakan sosial sebagai bagian dari strategi produktivitas, bukan hanya program bantuan. World Bank menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial meningkatkan modal manusia dan prospek ekonomi jangka panjang. ([Serviços e Informações do Brasil](#)) Bagi negara berkembang dengan sektor informal besar, ini berarti desain kebijakan

harus kompatibel dengan realitas pasar kerja: perlindungan sosial yang fleksibel, sistem identitas dan pembayaran digital yang terjangkau, serta program pelatihan ulang yang dekat dengan kebutuhan industri.

Implikasi ketiga adalah pentingnya membangun kedaulatan digital yang terbuka. ITU dan UNDP sama-sama menunjukkan bahwa eksklusi digital dapat mengunci ketertinggalan di era AI. ([ITU](#)) Karena itu, negara berkembang tidak boleh puas hanya sebagai pengguna platform global. Mereka perlu membangun ekosistem data, talenta digital, infrastruktur komputasi, perlindungan konsumen digital, dan kapasitas inovasi lokal. Agenda ini bukan anti-globalisasi; justru inilah syarat agar partisipasi dalam globalisasi tidak bersifat subordinatif.

Implikasi keempat ialah kebutuhan reformasi kebijakan fiskal. Dalam banyak negara berkembang, ruang fiskal sempit karena utang, subsidi yang kurang tepat sasaran, dan basis pajak yang rapuh. Tetapi tanpa fiskal yang sehat dan progresif, mustahil membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan transisi hijau. World Bank mengingatkan bahwa di banyak negara, subsidi menghabiskan anggaran lebih besar daripada transfer yang lebih efektif untuk kelompok bawah. ([Serviços e Informações do Brasil](#)) Maka reformasi fiskal bukan hanya soal disiplin anggaran, melainkan juga soal keberpihakan pembangunan.

8. Penutup

Jalan menuju kemakmuran inklusif di era globalisasi tidak pernah sederhana. Dunia telah membuktikan bahwa keterbukaan ekonomi mampu mempercepat pertumbuhan, memperluas pilihan, dan mengangkat banyak orang dari kemiskinan. Namun dunia juga kini menyaksikan batas-batas model pembangunan yang terlalu bergantung pada pertumbuhan rata-rata, efisiensi sempit, dan asumsi bahwa pasar akan otomatis mendistribusikan manfaat secara adil. Data mutakhir menunjukkan perlambatan kemajuan pembangunan manusia, bertahannya ketimpangan,

rapuhnya pasar kerja, masih lebarnya kesenjangan digital, dan membesarnya ancaman iklim. ([World Bank](#))

Karena itu, *Prosperity for All* harus dipahami sebagai proyek kelembagaan dan moral sekaligus. Ia menuntut pertumbuhan yang menghasilkan pekerjaan bermutu; investasi besar pada pendidikan, kesehatan, dan konektivitas; pasar yang kompetitif dan tidak ditangkap kepentingan sempit; perlindungan sosial yang luas dan adaptif; serta transformasi digital-hijau yang memanusiakan. Kemakmuran inklusif juga menuntut pembaruan tata kelola global agar negara berkembang tidak terus dibebani ketegangan dagang, utang, ketidakpastian kebijakan, dan arsitektur nilai yang timpang. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Pada akhirnya, kemakmuran yang inklusif bukanlah kemakmuran yang menetes dari atas, melainkan kemakmuran yang dibangun dari pelebaran kesempatan, penghargaan terhadap martabat kerja, dan penguatan daya tahan sosial. Masyarakat yang sungguh makmur bukan hanya masyarakat yang lebih kaya, tetapi masyarakat di mana lebih banyak orang dapat naik kelas, hidup lebih aman, berpartisipasi lebih penuh, dan melihat masa depan dengan harapan yang masuk akal. Di sanalah makna terdalam dari *prosperity for all*.

Glosarium

Globalisasi

Proses integrasi ekonomi, sosial, teknologi, dan informasi antarnegara yang mempercepat arus barang, jasa, modal, data, dan gagasan.

Kemakmuran inklusif

Keadaan ketika pertumbuhan ekonomi memperluas kesempatan, memperbaiki distribusi hasil, dan memperkuat ketahanan sosial bagi kelompok masyarakat secara luas.

Shared prosperity

Konsep World Bank yang menilai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan kelompok pendapatan bawah.

Prosperity gap

Ukuran yang digunakan World Bank untuk menilai jarak masyarakat dari ambang pendapatan tertentu yang dianggap cukup bagi kemakmuran dasar.

Ketimpangan kesempatan

Ketidaksetaraan yang berasal dari perbedaan akses awal terhadap pendidikan, kesehatan, konektivitas, jaringan sosial, atau aset.

Ketimpangan hasil

Ketidaksetaraan yang tampak dalam pendapatan, kekayaan, konsumsi, atau kualitas hidup setelah proses pasar berjalan.

Jobs gap

Jumlah orang yang ingin bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan, termasuk mereka yang tidak tercatat sebagai penganggur formal.

Middle-income trap

Kondisi ketika negara berpendapatan menengah kesulitan naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas melambat dan transformasi struktural tersendat.

3i strategy

Kerangka World Bank untuk pembangunan negara berkembang: *investment, infusion, dan innovation*.

Inklusi digital

Perluasan akses yang adil terhadap internet, perangkat, keterampilan digital, dan keamanan penggunaan teknologi.

Inklusi keuangan

Ketersediaan dan penggunaan layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan relevan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Perlindungan sosial

Serangkaian kebijakan publik yang melindungi individu atau rumah tangga dari risiko ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, sakit, pengangguran, dan usia lanjut.

Just transition

Transisi menuju ekonomi rendah karbon yang dirancang agar adil bagi pekerja, rumah tangga, dan komunitas yang terdampak.

Kontestabilitas pasar

Kondisi pasar yang memungkinkan pelaku baru masuk dan bersaing secara adil, sehingga kekuatan dominan pelaku lama dapat dibatasi.

Kapabilitas

Kemampuan nyata seseorang untuk menjalani hidup yang ia nilai berharga, termasuk melalui akses pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kebebasan memilih.

Referensi (APA 7)

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.

International Telecommunication Union. (2024). *Facts and figures 2024*. ITU.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, April 2025: A critical juncture amid policy shifts*. IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Economic outlook: Global growth to remain resilient in 2025 and 2026 despite significant risks*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Society at a glance 2024: Income and wealth inequalities*. OECD.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of artificial intelligence*. UNDP.

World Bank. (2024). *Policies for inclusive growth: Strengthening the link between economic growth and equity*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Bank. (2024). *World development report 2024: The middle-income trap*. World Bank.

World Bank. (2025). *The Global Findex database 2025*. World Bank.

World Bank. (2025). *The state of social protection 2025: The 2-billion-person challenge*. World Bank.

World Inequality Database. (2024). *10 facts on global inequality in 2024*. WID.world.

World Trade Organization. (2024). *World trade report 2024: Trade and inclusiveness—How to make trade work for all*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 12 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69db94ae-3dec-8398-916d-3a7fb8f50b29>